

**KAJIAN TINGKAT PERKEMBANGAN WILAYAH
UNTUK PENENTUAN PRIORITAS PENGEMBANGAN DI
KABUPATEN BOYOLALI JAWA TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-1
Fakultas Geografi



Oleh :

Tri Murtopo

Nim : E100 040 009

**FAKULTAS GEOGRAFI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2009

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan merupakan usaha sadar dan berencana untuk meningkatkan mutu hidup yang dalam pelaksanaannya akan selalu menggunakan dan mengelola sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya buatan (Sugeng Martopo, 1997). Salah satu tujuan pokok dari pembangunan itu adalah pembangunan wilayah-wilayah yang ada didalamnya terutama dalam keserasian perkembangan atau laju pertumbuhan antar wilayah dalam daerah tersebut. Faktor pendorong perkembangan suatu wilayah sangat terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana wilayah khususnya sarana dan fasilitas sosial ekonomi. Sarana dan fasilitas ekonomi seringkali merupakan faktor dominan yang berperan dalam memajukan wilayah.

Hubungan antara manusia dengan lingkungan baik bersifat fisik maupun yang menyangkut makhluk hidup lainnya beserta permasalahannya menjadi salah satu obyek yang dapat dikaji oleh Ilmu Geografi. Wilayah dengan segala isi dan aspeknya dikaji Geografi melalui elemen-elemen obyek kajian sebagai sistem atau tidak terpisah satu dengan lainnya. Kajian secara integral atau menyeluruh merupakan salah satu pendekatan untuk memecahkan berbagai masalah dengan menggunakan analisa keruangan (Bintarto dan Surastopo, 1979).

Aplikasi pendekatan keruangan tersebut dapat diterapkan dalam studi yang berkenaan dengan segala aspek yang berhubungan dengan tingkat kemakmuran penduduk. Pada umumnya masalah yang muncul tidak hanya menyangkut aspek demografi melainkan juga hubungan antar individu serta keruangannya maka studi tersebut erat kaitannya dengan studi Geografi.

Sintesa fakta yang ada menunjukkan bahwa pusat perkembangan suatu wilayah pada umumnya berfungsi sebagai pusat pelayanan yang mempunyai sarana dan prasarana dengan kapasitas lebih besar. Jumlah, fungsi, serta peranan yang harus diberikan disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan bagi wilayah pusat itu sendiri. Wilayah sekitarnya seringkali mengalami ketertinggalan dalam memenuhi permintaan bagi wilayahnya.

Terkonsentrasinya fasilitas-fasilitas pelayanan di pusat kota menjadikan daerah pusat ini akan semakin dipadati penduduk yang menuntut lebih banyak lagi fasilitas pelayanan sosial. Kebutuhan penduduk wilayah di luar pusat kota yang belum terpenuhi mendorong arus penduduk menuju ke pusat-pusat pelayanan, yaitu di pusat kota. Perencanaan pelayanan yang merata di semua wilayah, tidak saja di pusat kota, menjadi sangat penting. Perencanaan pelayanan merupakan pendorong aktivitas ekonomi wilayah dan tingkat pelayanan akan menjadi stimulus terhadap tingkat perkembangan suatu wilayah.

Terkonsentrasinya fasilitas-fasilitas pelayanan dipusat ~~kota~~ meningkatnya jumlah penduduk, kesenjangan tingkat penduduk dan kesejahteraan, dan mutu kesehatan merupakan beberapa masalah yang semestinya dapat diatasi dengan adanya pemerataan fasilitas pelayanan. Perkembangan tingkat pelayanan merupakan cerminan dari perkembangan suatu wilayah. Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Boyolali Periode Tahun 2004-2014 telah mengarahkan bahwa untuk pemerataan pembangunan wilayah maka Kabupaten Boyolali terbagi menjadi 4 Subwilayah Pembangunan (SWP) yaitu :

1. Subwilayah Pembangunan (SWP) I, SWP I meliputi daerah pertanian yang subur yang mencakup Kecamatan Mojosongo, Teras, Banyudono, Sawit, Musuk dan Ngemplak dengan penggunaan lahan yang didominasi oleh lahan sawah dengan pusat pengembangan di Kecamatan Banyudono.
2. Subwilayah Pembangunan (SWP) II, SWP II meliputi kecamatan di lereng Gunung Merapi dan Merbabu dengan penggunaan lahan didominasi oleh perkebunan dan tegalan mencakup Kecamatan Selo, Cepogo, dan Ampel dengan pusat pengembangan di Kecamatan Ampel dan Cepogo.
3. Subwilayah Pembangunan (SWP) III , SWP III meliputi daerah kering yang mencakup Kecamatan Sambu, Simo, Nogosari, Andong, Klego, Juwangi, Karanggede, Wonosegoro, dan Kemusu dengan pusat pengembangan di Kecamatan Karanggede dengan penggunaan lahan yang didominasi oleh lahan sawah dan tegalan.
4. Subwilayah Pembangunan (SWP) IV, SWP IV meliputi wilayah perkotaan yaitu Kecamatan Boyolali yang telah memiliki perencanaan *detail* dan

master plan kota dengan didominasi oleh penggunaan lahan berupa lahan terbangun dan pemukiman.

Meskipun secara konseptual telah dikembangkan strategi pembangunan untuk pemerataan hasil-hasil pembangunan, dengan pembentukan SWP seperti diatas, ternyata kesenjangan di Kabupaten Boyolali terjadi dalam berbagai tingkatan.

Kesenjangan yang pertama yaitu mengenai tingkat kepadatan penduduk dimana tingkat kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Boyolali yaitu sebanyak 2.228 jiwa/km², Sawit 1.915 jiwa/km², Ngemplak 1.809/km², dan Banyudono 1.777 jiwa/km². Sedangkan untuk Kecamatan lainnya mempunyai kepadatan berkisar 435-1.499/km². Sebagian besar kecamatan mempunyai kepadatan dibawah 1.000 jiwa/km². Hal ini menunjukkan telah terjadinya penumpukan penduduk ke arah pusat perkembangan wilayah atau pusat kota di Kabupaten Boyolali.

Tabel 1.1
Kepadatan Penduduk Kabupaten Boyolali tahun 2006

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jml Pddk	Kepadatan penduduk (Jiwa/KM ²)
1	Selo	56.078	26.777	477
2	Ampel	90.391	68.561	756
3	Cepogo	52.998	51.722	976
4	Musuk	65.041	60.150	925
5	Boyolali	26.251	58.496	2.228
6	Mojosongo	43.411	51.026	1.175
7	Teras	29.936	44.866	1.499
8	Sawit	17.233	33.001	1.915
9	Banyudono	25.379	45.086	1.777
10	Sambi	46.491	48.572	1.045
11	Ngemplak	38.527	69.686	1.809
12	Nogosari	55.084	60.849	1.105
13	Simo	48.040	43.340	902
14	Karanggede	41.756	40.807	977
15	Klego	51.877	45.385	875
16	Andong	54.528	61.213	1.123
17	Kemusu	99.084	46.033	465
18	Wonosegoro	92.998	53.839	579
19	Juwangi	79.994	34.772	435

Sumber : Kabupaten Boyolali dalam Angka Tahun 2006, BPS

Kecamatan Wonosegoro mempunyai kepadatan penduduk 579 jiwa/km², 1230 jiwa/ km². Kecamatan Selo 477 jiwa/km², Kemusu 465 jiwa/km², dan Juwangi 435 jiwa/km². Kepadatan penduduk yang tinggi berada di kecamatan yang merupakan pusat-pusat kegiatan yang didukung oleh faktor aksesibilitas yang mudah. Sebaran kepadatan penduduk tiap kecamatan disajikan pada Tabel 1.1

Rata-rata kepadatan kecamatan di seluruh Kabupaten Boyolali yaitu sebanyak 1.108 jiwa/ jiwa/km². Kepadatan tertinggi kecamatan di Kabupaten Boyolali adalah yaitu Kecamatan Boyolali sebanyak 2.228 jiwa/km², adapun terendah adalah Kecamatan Juwangi sebanyak 435 jiwa/km² atau terpaut 1793 jiwa//km². Hal ini menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan dalam distribusi penduduk antar kecamatan. Ketimpangan ini menunjukkan adanya pemusatan jumlah penduduk yang tidak merata dimana sebagian besar kecamatan mempunyai kepadatan di bawah 1.000 jiwa/km². Kecamatan-kecamatan dengan kepadatan diatas 1.000 jiwa/km² berjumlah 9 kecamatan dari 19 kecamatan yang ada. Ketimpangan dalam distribusi kepadatan penduduk ini akan berpengaruh terhadap PDRB perkapita masing-masing wilayah kecamatan, mengingat PDRB Perkapita merupakan hasil bagi PDRB Kecamatan dibagi dengan jumlah penduduk di kecamatan yang bersangkutan.

Kesenjangan kedua tampak dari PDRB perkapita masing-masing Kecamatan di Kabupaten Boyolali. Kecamatan di Kabupaten Boyolali rata-rata mempunyai PDRB Perkapita sebesar Rp. 5.223.451.18,00. PDRB Perkapita terbesar adalah Kecamatan Banyudono dengan Rp. 11.194.596.07, bila dibandingkan dengan PDRB Perkapita terkecil yaitu Kecamatan Kemusu sebesar Rp. 3.615.937,70 maka mempunyai selisih sebesar Rp.7.578.658,37. Sebagian besar PDRB Perkapita kecamatan yang ada di Kabupaten Boyolali berada dibawah Rp.6.000.000,00 (setara dengan Rp. 500.000,00 per bulan). Jumlah itu belum memenuhi upah minimum regional kota yang mencapai Rp.550.000/bulan.

Tabel 1.2
PDRB Perkapita Kabupaten Boyolali tahun 2006

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	PDRB Perkapita (Rupiah)
1	Selo	26.777	5.371.946,05
2	Ampel	68.561	5.726.056,36
3	Cepogo	51.722	5.827.400,81
4	Musuk	60.150	5.122.461,62
5	Boyolali	58.496	7.123.145,28
6	Mojosongo	51.026	4.856.176,19
7	Teras	44.866	9.830.033,87
8	Sawit	33.001	5.920.133,50
9	Banyudono	45.086	11.194.596,07
10	Sambi	48.572	4.549.474,47
11	Ngemplak	69.686	3.812.544,82
12	Nogosari	60.849	4.548.628,04
13	Simo	43.340	5.807.101,99
14	Karanggede	40.807	5.312.971,11
15	Klego	45.385	4.336.733,60
16	Andong	61.213	4.067.963,80
17	Kemususu	46.033	3.615.937,70
18	Wonosegoro	53.839	4.065.136,88
19	Juwangi	34.772	3.984.531,14

Sumber : Boyolali dalam Angka Tahun 2006, BPS

Kesenjangan ketiga adalah ketersediaan fasilitas perdagangan dimana ketidakmerataan pembangunan terjadi seperti penyediaan fasilitas pasar. Sebagian besar kecamatan mengalami kelebihan ketersediaan dari kebutuhan standarnya tetapi didapati kecamatan yang sama sekali tidak memiliki pasar, seperti Kecamatan Selo, Musuk, Mojosongo, Teras, dan Nogosari. Kecamatan yang memiliki ketersediaan riil tertinggi yaitu Kecamatan Wonosegoro dan Karanggede yaitu 500% atau mempunyai lima kali lipat kebutuhan yang ada. Prosentase kesenjangan ketersediaan ini signifikan jika dibandingkan Kecamatan Selo, Musuk, Mojosongo, Teras, dan Nogosari.

Tabel 1.3
Fasilitas Perdagangan Kabupaten Boyolali Tahun 2006

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kebutuhan Pasar Standar	Ketersediaan Pasar riil	% Ketersediaan Pasar riil
1	Selo	26.777	1	0	0
2	Ampel	68.561	2	0	0
3	Cepogo	51.722	2	4	200
4	Musuk	60.150	2	0	0
5	Boyolali	58.496	2	9	450
6	Mojosongo	51.026	2	0	0
7	Teras	44.866	1	0	0
8	Sawit	33.001	1	2	200
9	Banyudono	45.086	2	6	300
10	Sambi	48.572	2	0	0
11	Ngeplak	69.686	2	5	250
12	Nogosari	60.849	2	0	0
13	Simo	43.340	1	4	400
14	Karanggede	40.807	1	5	500
15	Klego	45.385	2	3	150
16	Andong	61.213	2	6	300
17	Kemus	46.033	2	8	400
18	Wonosegoro	53.839	2	10	500
19	Juwangi	34.772	1	4	400

Sumber : Boyolali dalam Angka Tahun 2006, BPS dan Analisa oleh penulis

Keterangan:

$$\% \text{ Ketersediaan riil} = \frac{\text{KetersediaanPasarRiil}}{\text{KebutuhanPasarS tan dar}} \times 100\%$$

Tabel 1.4
Fasilitas Kesehatan Kabupaten Boyolali Tahun 2006

No	Kecamatan	Jml Pddk	Keb pus standar	Ketersediaan Pus riil	% ket Pus Riil	keb pus pbt standar	Ket Pus Pb Pb Riil	% ket Pus Pb Riil	Keb Pr dkt Riil	Ket Pr. Dok Riil	% ket Pr. Dok Riil
1	Selo	26777	1	2	200%	2	2	100%	5	1	20%
2	Ampel	68561	2	3	150%	5	2	40%	14	10	71%
3	Cepogo	51722	2	2	100%	3	2	67%	10	4	40%
4	Musuk	60150	2	3	150%	4	3	75%	12	5	42%
5	Boyolali	58496	2	3	150%	4	3	75%	12	33	275%
6	Mojosongo	51026	2	1	50%	3	3	100%	10	9	90%
7	Teras	44866	1	1	100%	3	3	100%	9	11	122%
8	Sawit	33001	1	3	300%	2	3	150%	7	10	143%
9	Banyudono	45086	2	2	100%	3	2	67%	9	12	133%
10	Sambi	48572	2	2	100%	3	2	67%	10	4	40%
11	Ngemplak	69686	2	2	100%	5	2	40%	14	13	93%
12	Nogosari	60849	2	2	100%	4	2	50%	12	5	42%
13	Simo	43340	1	1	100%	3	2	67%	9	9	100%
14	Karanggede	40807	1	2	200%	3	2	67%	8	9	113%
15	Klego	45385	2	2	100%	3	2	67%	9		0%
16	Andong	61213	2	2	100%	4	3	75%	12	4	33%
17	Kemusu	46033	2	3	150%	3	4	133%	9	3	33%
18	Wonosegoro	53839	2	1	50%	4	2	50%	11	2	18%
19	Juwangi	34772	1	2	200%	2	3	150%	7	4	57%

Sumber : Boyolali dalam Angka Tahun 2006, BPS

Keterangan: $\% \text{ Ketersediaan riil} = \frac{\text{KetersediaanPasarRiil}}{\text{KebutuhanPasarS tan dar}} \times 100\%$

Kesenjangan keempat adalah ketersediaan fasilitas kesehatan yaitu puskesmas dimana terdapat kecamatan yang ketersediaan riilnya belum memenuhi kebutuhan yang harus disediakan. Kecamatan Sawit mempunyai tingkat ketersediaan riil tertinggi yaitu mencapai 300% dari kebutuhan. Sedangkan kecamatan yang belum terpenuhi standar kebutuhannya adalah Kecamatan Wonosegoro yang ketersediaan riil hanya 50% dari kebutuhan standar atau paling kecil diantara kecamatan lainnya. Kesenjangan yang terjadi sebesar 250% dibanding dengan Kecamatan Sawit. Walaupun angka rata-rata ketersediaan fasilitas kesehatan untuk Kabupaten Boyolali 132% namun masih ada 7 Kecamatan yang masih mengalami kekurangan ketersediaan sesuai kebutuhan standar.

Ketersediaan riil puskesmas pembantu juga mengalami kesenjangan antar kecamatan dan ketersediaan riil tiap kecamatan rata-rata yaitu sebesar 81%, Kecamatan Sawit dan Juwangi mempunyai ketersediaan riil yang paling besar yaitu 150% dari kebutuhan standar, Sedangkan tingkat ketersediaan riil terkecil yaitu Kecamatan Ngemplak dan Ampel yang ketersediaannya yaitu 40% dari kebutuhan standar atau kesenjangan mencapai 110% jika dibandingkan dengan Kecamatan Sawit. Sebagian besar kecamatan ketersediaan riilnya belum terpenuhi sesuai kebutuhan standar.

Ketersediaan riil tempat praktek dokter tertinggi adalah Kecamatan Boyolali yang mencapai 275% dari kebutuhan standar, Sangat timpang bila dibandingkan dengan sebagian besar kecamatan yang ketersediaan riilnya belum terpenuhi sesuai standar kebutuhan. Kecamatan Klego memiliki ketersediaan riil terkecil yaitu 0% atau sama sekali tidak mempunyai fasilitas pelayanan ini dengan kesenjangan mencapai 275% dengan Kecamatan Boyolali. Secara keseluruhan ketersediaan tempat praktek dokter mengalami kesenjangan karena hanya 6 kecamatan sedangkan yang 13 kecamatan belum terpenuhi sesuai standar.

Kesenjangan Kelima yaitu kerapatan Jaringan jalan dimana sebagian besar Kecamatan mempunyai kerapatan Jaringan jalan atau kerapatan jaringan jalan dibawah 7.794.14 m/km² dan rata-rata kepadatan jalan mencapai. 642707.1579

m/km². Tingkat kerapatan Jaringan jalan jalan tertinggi yaitu di kecamatan Boyolali yaitu 10.337,408 m/km², Perbedaan sangat ekstrim bahkan hampir 2 (dua) kali lipatnya dari keempat kecamatan diatas bila dibandingkan dengan kecamatan Kecamatan Selo yang mempunyai kepadatan jalan terkecil yaitu 3.479.713 m/km².

Tabel 1.5
Kepadatan jalan di Kabupaten Boyolali Tahun 2006

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Panjang jalan	Kerapatan Jaringan Jalan (Panjang jalan/luas wilayah)
1	Selo	56.0780	195.135,3737	3.479,7135
2	Ampel	90.3910	419.293,3963	4.638,6631
3	Cepogo	52.9980	307.621,2414	5.804,3934
4	Musuk	65.0410	425.774,8154	6.546,2526
5	Boyolali	26.2510	271.367,2974	10.337,4080
6	Mojosongo	43.4110	286.987,6813	6.610,9438
7	Teras	29.9360	8 1.496,5617	7.064,9573
8	Sawit	17.2330	137.527,0966	7.980,4501
9	Banyudono	25.379	261.714,2984	10.312,2384
10	Sambi	46.4950	311.266,1942	6.694,6165
11	Ngemplak	38.5270	251.574,4984	6.529,8232
12	Nogosari	55.0840	298.309,0049	5.415,5291
13	Simo	48.0400	292.267,3902	6.083,8341
14	Karanggede	41.7560	325.451,9553	7.794,1363
15	Klego	51.8770	228.143,1454	4.397,7706
16	Andong	54.5280	349.398,9075	6.407,6971
17	Kemusu	99.0840	454.663,3720	4.588,6659
18	Wonosegoro	92.9980	537.468,6330	5.779,3569
19	Juwangi	79.9940	195.135,3737	5.647,9055

Sumber :Kabupaten Boyolali dalam Angka Tahun 2006, BPS dan Analisa Data Penulis Tahun 2008

Kelima, kesenjangan yang tampak di Kabupaten Boyolali mendesak untuk diupayakan suatu perencanaan dalam pengembangan wilayah yang optimal dan terpadu. Hal ini dimaksudkan untuk untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah yang optimal dan terpadu. Langkah yang diambil pertama kali untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah ini adalah mengetahui tingkat diferensiasi

perkembangan wilayah di masing-masing Kecamatan dan SWP. Selanjutnya dapat diklasifikasikan dalam program yang bertahap pembangunan yang bertahap. Hal ini berguna untuk memberikan alternatif penentuan wilayah-wilayah prioritas pengembangan di Kabupaten Boyolali.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini diberi judul:
**”KAJIAN TINGKAT PERKEMBANGAN WILAYAH UNTUK
 PENENTUAN PRIORITAS PENGEMBANGAN DI KABUPATEN
 BOYOLALI JAWA TENGAH”**

1.2 Perumusan Masalah

Berasarkan uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah persebaran perkembangan wilayah di Kabupaten Boyolali Jawa Tengah?
2. Bagaimanakah pola persebaran perkembangan wilayah Kabupaten Boyolali Jawa Tengah ?
3. Wilayah-wilayah manakah yang harus diprioritaskan untuk dikembangkan berdasarkan pada tingkat perkembangan dalam konteks untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah tiap-tiap Kecamatan di Kabupaten Boyolali Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui persebaran tingkat perkembangan wilayah di Kabupaten Boyolali,
2. Mengetahui pola perkembangan tingkat perkembangan wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2006.
3. dan menetapkan Skor prioritas pengembangan dalam kontek untuk mengurangi kesenjangan antar Kecamatan di Kabupaten Boyolali.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Boyolali untuk pengambilan kebijakan pengembangan wilayah, sebagai bahan

referensi lebih lanjut mengenai tingkat perkembangan dan kesenjangan antar wilayah khususnya Kabupaten Boyolali,

1.5 Tinjauan Pustaka dan Penelitian Sebelumnya

Menurut Bintarto (1977), geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan, keruangan, kelengkapan, dan kompleks wilayah. Obyek material pertama adalah kaitannya dengan beberapa aspek kehidupan manusia (lingkungan, dan aspek pembangunan, sedang objek material tersebut dari segi keruangan yang meliputi pola sistem dan proses.

Ilmu wilayah adalah suatu ilmu yang mempelajari wilayah, terutama sebagai suatu sistem, khususnya yang menyangkut hubungan interaksi dan interdependensi antara subsistem utama ekosistem dengan subsistem utama sosial sistem, serta kaitannya dengan wilayah-wilayah lainnya dalam bentuk suatu kesatuan wilayah guna pengembangan, termasuk penjagaan kelestarian wilayah tersebut (Sutami, 1977)

Pewilayahan adalah usaha membabagi-bagi permukaan bumi tertentu dengan tujuan tertentu pula. Pembagiannya dapat berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu seperti administratif, politis, ekonomi, sosial, kultural, fisis, geografis dan sebagainya. Penelitian di Indonesia berhubungan erat dengan pemerataan pembangunan dan mendasarkan pembangunan dan mendasarkan pembagian pada sumber daya lokal sehingga prioritas pembagian dapat dirancang.

Pewilayahan di Indonesia berhubungan erat dengan pemerataan pembangunan dan mendasarkan pembagiannya pada sumberdaya-sumberdaya lokal, sehingga prioritas pembangunan dapat dirancang dan dikelola sebaik-baiknya.

Hariri Hadi (1974 dalam Hadi sabari yunus1991) menyatakan bahwa pewilayahan untuk perencanaan pembangunan wilayah di Indonesia bertujuan untuk :

- a. Menyebar-ratakan pembangunan sehingga dapat dihindari adanya pemusatan kegiatan pembangunan yang berlebihan di daerah tertentu.
- b. Menjamin keserasian dan koordinasi antar berbagai kegiatan pembangunan yang ada di tiap-tiap daerah.
- c. Memberi pengarahan kegiatan pembangunan bukan saja pada aparatur pemerintah, baik pusat maupun daerah, tetapi juga pada masyarakat umum dan pengusaha.

Secara garis besar metode pewilayahan dapat digolongkan kedalam dua golongan besar, yaitu :

- a. Penyebaran wilayah, yaitu suatu usaha untuk membagi-bagi permukaan bumi menjadi beberapa bagian dengan cara mengubah atau menghilangkan faktor-faktor tertentu dalam populasi yang dianggap kurang penting dengan maksud untuk menonjolkan karakter-karakter tertentu.
- b. Klasifikasi wilayah, yaitu usaha untuk mengadakan penggolongan wilayah secara sistematis kedalam bagian-bagian tertentu. Penggolongan yang dimaksud harus memperlihatkan keseragaman sifat dan memperhatikan individu. Usaha untuk mengubah data seperti yang terjadi dalam proses penyebarannya wilayah tidak terdapat dalam klasifikasi wilayah.

Menurut Sugandhy (1984), perkembangan/pertumbuhan suatu wilayah (secara struktur sosial dan ekonominya) akan ditentukan oleh potensi sumberdaya alam (terutama kawasan budaya), potensi sumberdaya manusia (terutama kualitas) dan aspek kelembagaannya (terutama menyangkut kesiapan aparat, teknologi dan sumber pendanaan). Sementara itu Firman (dalam Fakhri Wahyudin, 2004) dalam penelitiannya tentang keterkaitan migrasi dengan masalah pengembangan masalah mengungkapkan komponen dalam perkembangan wilayah mengungkapkan komponen dalam perkembangan wilayah meliputi kegiatan-kegiatan ekonomi (industri, pertanian, dan sebagainya), potensi sumberdaya alam, kualitas sumberdaya manusia, potensi lokasi (aksesibilitas), serta kemampuan untuk menarik potensi-potensi ekonomi secara global seperti investasi asing.

Dusseldorp dalam Yohara T. Jayadinata (1999) membagi pengembangan wilayah menjadi tiga yaitu:

1. Menurut prinsip homogenitas atau uniformitas, yaitu wilayah geografi fisik/sosial, wilayah ekonomi, atau wilayah budaya.
2. Menurut konsep hubungan ruang, yaitu wilayah fungsional yang disebut juga wilayah terpusat
3. Menurut wilayah yang khusus yaitu wilayah terbelakang, wilayah aliran sungai, wilayah pedesaan, dan sebagainya, yang dikembangkan menurut prinsip uniformitas.

Dennis A.Rondinelli (1979) dalam bukunya mengungkapkan indeks tingkat perkembangan wilayah dapat dilihat secara sederhana dalam tiga indikator, yaitu:

- a. Karakter sosial ekonomi dan demografi diukur melalui pendapatan perkapita, kebutuhan fisik air minum, produk domestik regional bruto, investasi jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, jumlah usia harapan hidup, tingkat kematian bayi per 1000 penduduk, jumlah fasilitas kesehatan.
- b. Kontribusi Industri dan produksi pertanian diukur melalui prosentase penyerapan tenaga kerja jumlah perusahaan komersial, dan luas lahan sawah.luas lahan pertanian untuk hidup layak.
- c. Transportasi diukur melalui kualitas jalan, kepadatan lahan, tipe jalan, dan panjang jalan.

Perroux dengan *pole De Croisanne* atau *pole of growth* dalam bukunya Sadono sukirno (1976). Mengungkapkan pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada waktu yang sama tetapi hanya terjadi di beberapa tempat atau pusat pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda, dengan akibat akhir yang ditimbulkannya berbeda pula terhadap keseimbangan perekonomian.

Hakekat dari teori Perroux mengenai pembangunan daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Di dalam proses pembangunan akan muncul *L'Industrie Moxfice* atau industri pemimpin yang merupakan suatu industri yang menjadi penggerak utama dalam pembangunan suatu daerah.
2. Apabila Industri-industri terkumpul dalam suatu daerah atau kawasan tertentu, keadaan ini akan memperlancar proses pertumbuhan ekonomi, sebabnya adalah karena pengelompokan industri tadi akan menciptakan

konsumen-konsumen yang mempunyai pola-pola konsumsi yang berbeda dengan penduduk daerah pedesaan, permintaan untuk perumahan, pengangkutan dan jasa-jasa pemerintah akan muncul, berbagai jenis produsen dan pekerja-pekerja mahir akan berkembang, dan rangka dasar industri akan terbentuk.

3. Karena secara geografis pembangunan ekonomi tidak seimbang maka suatu perekonomian pada hakikatnya merupakan gabungan dari sistem yang secara relatif keadaannya (terdiri dari industri yang mengelompok) dan industri industri yang sifatnya relatif lebih pasif (terdiri dari industri-industri atau daerah-daerah yang tergantung pada kegiatan dipusat pertumbuhan).

Perroux menunjukkan bahwa ditinjau dari sudut lokasi kegiatan ekonomi daerah, pembangunan ekonomi tidak merata terjadinya di berbagai daerah dan mempunyai kecenderungan untuk mengelompok pada pusat-pusat pertumbuhan. Pusat-pusat pertumbuhan ini akan menentukan dan mendominasi perkembangan daerah-daerah lain yang lebih lambat perkembangannya.

Didit Hasto Hendratmoko (2005) dalam penelitiannya yang berjudul "Kajian Tingkat Perkembangan Wilayah Untuk Pemilihan Wilayah Prioritas Pengembangan di Kabupaten Wonogiri" bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat perkembangan wilayah tiap-tiap Kecamatan di Kabupaten Wonogiri, Mengetahui pola persebaran tingkat perkembangan wilayah di Kabupaten Wonogiri, dan menentukan wilayah prioritas pengembangan dalam konteks untuk mengurangi kesenjangan perkembangan antar wilayah. Metode yang dipakai adalah metode analisa data sekunder yaitu mengolah data yang sudah ada yaitu data tahun 1998 dan 2002. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepadatan penduduk, PDRB, penduduk tamat Perguruan Tinggi (PT), Kepemilikan telepon dan wartel, Kepemilikan sarana transportasi/pelayanan kesehatan, pelayanan perekonomian, pelayanan pendidikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi perbedaan yang tingkat perkembangan wilayah yang cukup mencolok di Kabupaten Wonogiri, Tingkat perkembangan wilayah di

Kabupaten Wonogiri mempunyai sebaran acak, Perhitungan analisa tetangga terdekat menunjukkan angka sebesar 0,95 untuk wilayah dengan perkembangan sedang dan 0,96 untuk wilayah perkembangan tertinggal, sedangkan wilayah maju hanya wilayah wonogiri, Wilayah-wilayah yang menjadi prioritas untuk dikembangkan dalam konteks untuk mereduksi fenomena kesenjangan wilayah meliputi Kecamatan : Giritontro, Batuwarno, Eromoko, Mayaran, Jatiroto, Kismantoro, Slogohimo, dan jatipurno. Prioritas II meliputi Girimarto, Karang tengah, dan Paranggupito, Prioritas III meliputi Kecamatan : Pracimantoro, Baturetno, Wuryantoro, dan jatisrono.

Tabel.1. 6.
Perbandingan Penelitian Sebelumnya

Penulis	Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Didit Hasto H (2005)	Kajian Tingkat Perkembangan Wilayah Untuk Pemilihan Wilayah Prioritas Pengembangan di Kabupaten Wonogiri	a. Mengukur derajat kesenjangan wilayah b. Menentukan wilayah prioritas pengembangan	Analisis data sekunder	Terjadi Perbedaan yang signifikan pada masing-masing kelurahan di Kecamatan Aek Kanopan
Nugroho Adi Prabowo (2005)	Analisis Tingkat Perkembangan Wilayah di Subwilayah Pembangunan (SWP) I Kabupaten Boyolali Jawa Tengah”	a. Mengetahui hubungan antara ketersediaan fasilitas ekonomi dengan tingkat perkembangan wilayah b. Mengetahui hubungan antara daya layan fasilitas ekonomi dengan tingkat perkembangan wilayah c. Mengetahui tingkat perkembangan wilayah	Analisis data sekunder	Distribusi fasilitas pelayanan sosial ekonomi tersebar merata pada setiap Kecamatan
Tri Murtopo (2008)	”Kajian Tingkat Perkembangan Wilayah Untuk Penentuan Prioritas Pengembangan di Kabupaten Boyolali Jawa Tengah	a. Mengetahui perbedaan tingkat perkembangan wilayah tiap-tiap Kecamatan di Kabupaten Boyolali. b. Mengetahui pola persebaran tingkat perkembangan wilayah di Kabupaten Boyolali. c. Menetapkan wilayah prioritas pengembangan dalam konteks untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.	Analisi Data sekunder	-

Sumber: Penulis, 2008

Nugroho Adi Prabowo (2005) dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Tingkat Perkembangan Wilayah di Subwilayah Pembangunan (SWP) I Kabupaten Boyolali Jawa Tengah" bertujuan untuk mengetahui hubungan antara ketersediaan fasilitas sosial ekonomi, dengan tingkat perkembangan wilayah di Sub Wilayah Pembangunan (SWP) I Kabupaten Boyolali, Mengetahui hubungan antara daya layan Fasilitas sosial ekonomi dengan tingkat perkembangan wilayah di Subwilayah Pembangunan (SWP) I Kabupaten Boyolali. Variabel yang digunakan berupa data primer dan sekunder, berupa jumlah penduduk, fasilitas pendidikan (SD-SMA), fasilitas kesehatan (ketersediaan rumah sakit, puskesmas, rumah bersalin, puskesmas pembantu, poliklinik, dan jumlah BKIA), fasilitas perdagangan, dan jasa (ketersediaan toko, warung, rumah makan, dan bank). Metode yang dipakai adalah dengan analisa data sekunder yang menekankan pada survei instansional, dengan pendekatan analisis kuantitatif, analisis korelasi, analisis peta, analisis diskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan secara umum distribusi fasilitas sosial ekonomi tersebar merata pada subwilayah pembangunan (SWP) I Kabupaten Boyolali.

Untuk mengetahui sebaran tingkat perkembangan wilayah di Kabupaten Boyolali maka digunakan pemetaan terhadap tingkat perkembangan masing-masing wilayah. Hasil dari pemetaan tingkat perkembangan wilayah akan menggambarkan deferensi tingkat perkembangan wilayah yang dialami masing-masing satuan pemetaan. Sebaran dari tingkat perkembangan wilayah dapat dianalisis dengan analisa perpetaan dan statistik diskriptif untuk mengungkap lebih dalam sehingga akan nampak profil tingkat perkembangan wilayah yang akan dikaji.

Hasil dari penelitian ini adalah untuk memilih wilayah-wilayah prioritas yang harus dikembangkan dengan diskripsi mengenai kondisi dan potensi pengembangannya. Pemilihan wilayah prioritas pengembangan ini didasarkan atas tingkat perkembangan potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing wilayah. Disamping itu, kebijakan pengembangan wilayah yang telah ditetapkan digunakan pula sebagai pertimbangan sehingga wilayah-wilayah prioritas pengembangan akan dikembangkan dengan kebijakan pemerintah

daerah. Wilayah prioritas pengembangan yang diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu masukan untuk alternatif dalam rangka mereduksi fenomena kesenjangan antar wilayah yang terjadi

1.6 Kerangka Pemikiran

Memperhatikan persoalan-persoalan wilayah berarti memahami apa yang paling dibutuhkan oleh wilayah, disamping untuk memproyeksikan kendala-kendala wilayah di masa mendatang juga untuk langkah-langkahantisipasi. Hal ini berkaitan pula dengan metode perencanaan yang berorientasi pada problem solving terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh wilayah.

Sebagaimana diuraikan di bagian sebelumnya, permasalahan kesenjangan wilayah merupakan salah satu persoalan pokok yang dihadapi oleh Kabupaten Boyolali. Permasalahan kesenjangan antar wilayah ini menjadi salah satu permasalahan yang harus diprioritaskan untuk ditangani, dikaitkan dengan upaya untuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Salah satu ukuran untuk mengetahui adanya kesenjangan perkembangan antar wilayah, adalah dengan mengetahui deferensiasi perkembangan masing-masing wilayah di Kabupaten Boyolali yang ditunjukkan dengan tingkat perkembangan (*Level Of Development*). Tingkat perkembangan wilayah sendiri merupakan ukuran peringkat secara relatif yang menyatakan kemajuan yang dicapai wilayah sebagai hasil aktivitas pembangunan dibandingkan dengan wilayah lain.

Penelitian ini menggunakan asumsi bahwa standar atau ukuran parameter yang digunakan ini hanya berlaku untuk kabupaten Boyolali dan dipandang secara *chorologis* terhadap Kabupaten/Kota lainnya. Misalnya dalam hal struktur mata pencaharian sebagian besar penduduk di Kabupaten Boyolali adalah petani, petani yang dimaksud dalam hal ini adalah meliputi, pertanian sawah, tegalan, peternakan, perikanan, perkebunan dan lain-lain. Berbeda halnya dengan yang termasuk pertanian di Kabupaten Sukoharjo dan Klaten bahwa yang termasuk pertanian adalah hanya pertanian sawah.

Indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat perkembangan wilayah di dalam penelitian ini adalah yaitu mendasarkan pada pendapat namun tidak semua indikator digunakan dalam penelitian ini karena keadaan realitas di daerah penelitian yang belum memungkinkan indikator yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Indikator Sosial Ekonomi, yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan Perkapita (*population size*)
 - b. Ketersediaan Fasilitas Fisik

Tabel 1.7
Standar Fasilitas Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk Terlayani
1	TK	1.000 Penduduk tiap 1 unit
2	SD	1.600 Penduduk tiap 1 unit
3	SLTP/MTS	4.800 Penduduk tiap 1 unit
4	SLTA/MA	4.800 Penduduk tiap 1 unit

Sumber :Dinas Pekerjaan Umum, 1977

Tabel 1.8
Standar Fasilitas Kesehatan

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah Penduduk Terlayani
1	Puskesmas pembantu	15.000 Penduduk tiap 1 unit
2	Puskesmas	30.000 Penduduk tiap 1 unit
3	Tempat Praktek dokter	5.000 Penduduk tiap 1 unit

Sumber :Dinas Pekerjaan Umum, 1977

Tabel 1.9
Standar Fasilitas Perdagangan

No	Fasilitas Perdagangan	Jumlah Penduduk Terlayani
1	Toko	2.500 Penduduk tiap 1 unit
2	Pasar	30.000 Penduduk tiap 1 unit

Sumber :Dinas Pekerjaan Umum, 1977

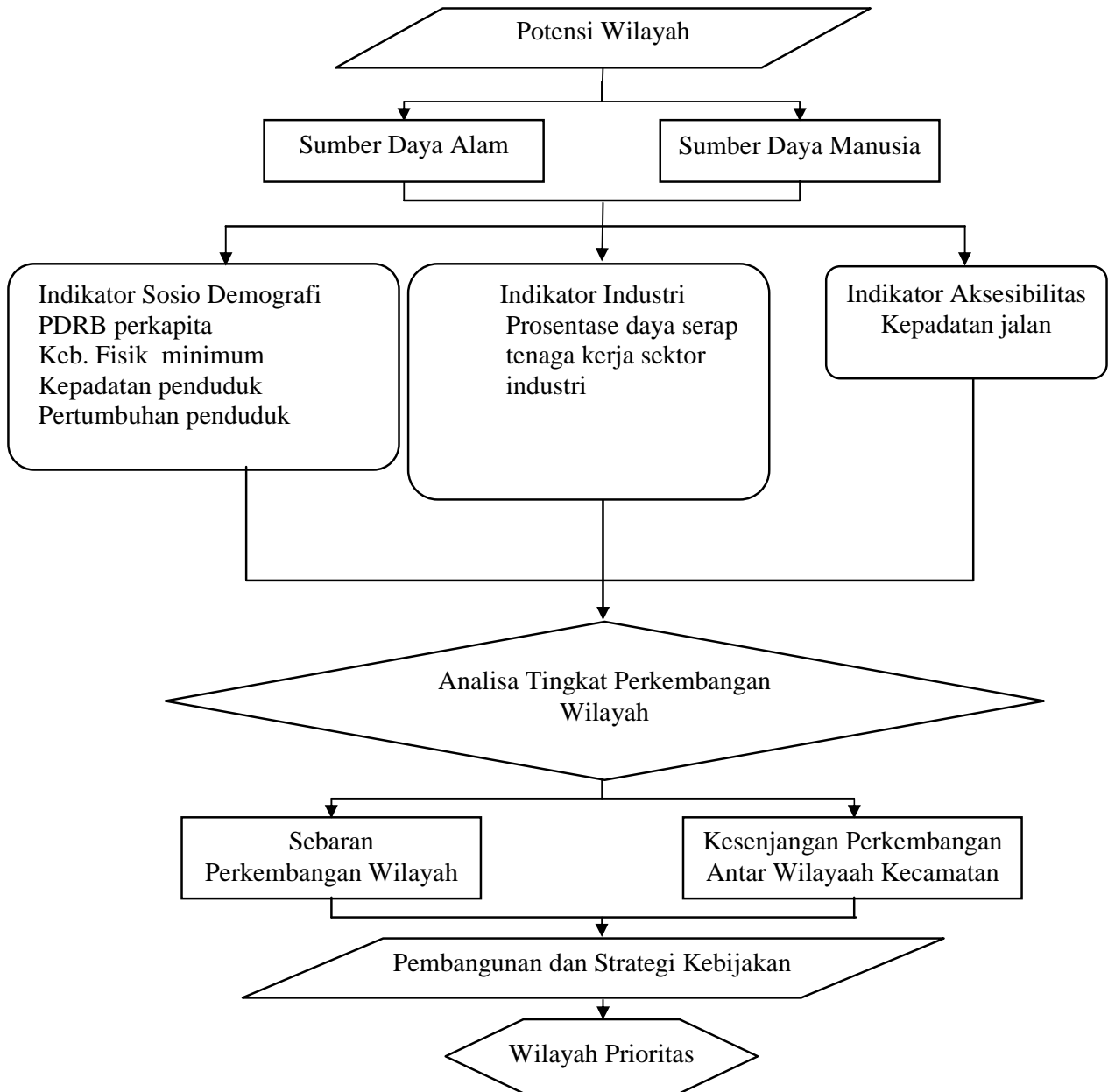
- c. Kontribusi PDRB
 - d. Kepadatan Penduduk
 - e. Pertumbuhan Penduduk
2. Indikator Kontribusi Industri yaitu /daya serap tenaga kerja sektor industri
 3. Indikator Aksesibilitas yaitu Kepadatan Jalan

Di Dalam penelitian ini data yang digunakan diambil dari Bappeda Kabupaten Boyolali dari Tahun 2002 dan 2006. Alasan penulis mengambil data dari tahun tersebut dikarenakan bahwa pentahapan pembangunan di Indonesia adalah dalam jangka waktu lima tahun. Unit analisis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah kecamatan. Dengan menggunakan unit analisis ini maka perbedaan tingkat perkembangan wilayah di Kabupaten Boyolali akan lebih terlihat nyata jika dibandingkan dengan menggunakan unit analisis SWP. Selain itu, dalam penentuan wilayah prioritas juga akan lebih cepat sasaran sehingga kesenjangan tingkat perkembangan wilayah akan dapat direduksi.

Kajian sebaran tingkat perkembangan wilayah di Kabupaten Boyolali menggunakan pemetaan terhadap tingkat perkembangan wilayah Kabupaten Boyolali berdasarkan tingkat perkembangan masing-masing wilayah. Hasil dari pemetaan tingkat perkembangan wilayah akan menggambarkan deferensiasi tingkat perkembangan wilayah yang dialami masing-masing satuan pemetaan. Sebaran dari tingkat perkembangan wilayah dapat dianalisis untuk mengungkap lebih dalam sehingga nampak profil tingkat perkembangan wilayah yang dikaji.

Hasil utama dari penelitian ini adalah untuk memilih wilayah-wilayah kecamatan yang diprioritaskan dikembangkan. Pemilihan wilayah prioritas pengembangan ini didasarkan atas tingkat perkembangan, potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing wilayah. Disamping itu kebijakan pengembangan wilayah yang telah ditetapkan digunakan pula sebagai bahan pertimbangan sehingga wilayah-wilayah prioritas pengembangan yang akan dikembangkan dapat diselaraskan dengan kebijakan yang ada. Wilayah prioritas pengembangan yang diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk alternatif dalam rangka mereduksi fenomena kesenjangan wilayah yang terjadi.

Untuk lebih mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini, pada kerangka penelitian dapat dilihat dalam diagram alir penelitian berikut:



Gambar1.1 Diagram Alir Penelitian

Sumber: Penulis

1.7 Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan wilayah yang tinggi umumnya adalah kecamatan yang didukung oleh aksesibilitas yang baik.
2. Perkembangan wilayah untuk tingkat perkembangan tinggi pada Tahun dan 2006 mempunyai pola mengelompok (*cluster*).

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa data sekunder yaitu mengolah data yang telah ada yaitu Data Tahun 2002 dan 2006 yang diterbitkan oleh Badan perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Boyolali.

1.8.1 Pemilihan Daerah Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil daerah penelitian meliputi 19 kecamatan di Kabupaten Boyolali dan secara lebih mendalam pada Kecamatan-kecamatan yang diprioritaskan untuk dikembangkan dikaitkan dengan upaya mengurangi kesenjangan wilayah. Pertimbangan yang melatarbelakangi pemilihan penelitian adalah sebagai berikut:

- a) Perkembangan wilayah Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Boyolali menarik untuk dikaji karena perkembangan wilayahnya cenderung lambat dibandingkan dengan daerah atau Kabupaten lainnya yang ada disekitarnya (Jawa Tengah dalam Angka 2005).
- b) Fasilitas-fasilitas pelayanan di daerah-daerah belakang masih kurang dan masih sulitnya akses terhadap fasilitas pelayanan sehingga terlihat kesenjangan antar wilayah kecamatan, untuk itu perlu adanya penambahan dan pengembangan fasilitas pelayanan sosial ekonomi.

1.8.2 Cara Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Kantor Statistik, dan BAPPEDA Kabupaten Boyolali. Data tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Rencana umum tata ruang kota dan wilayah Kabupaten Boyolali
- b. Kontribusi PDRB Perkapita
- c. Ketersediaan Fasilitas Fisik
- d. Pertumbuhan Penduduk
- e. Kepadatan penduduk
- f. Prosentase daya serap Jumlah Tenaga Kerja sektor industri
- g. kerapatan Jaringan Jalan

1.8.3 Analisa Data

Analisa data bertujuan untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan dipahami dan melihat kecenderungan data yang sekaligus mencerminkan perilaku obyek penelitian.

Tabel 1.10
Indikator Perkembangan Wilayah

Indikator	Variabel	Asumsi
Sosial ekonomi dan demografi	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kontribusi PDRB ❖ Ketersediaan fisik ❖ Pertumbuhan penduduk ❖ Kepadatan Penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Semakin tinggi PDRB Perkapita semakin tinggi perkembangan wilayah ❖ Semakin tinggi ketersediaan semakin tinggi perkembangan suatu wilayah ❖ Semakin rendah prosentase pertumbuhan penduduk maka semakin tinggi perkembangan wilayah ❖ Semakin rendah kepadatan penduduk maka semakin berkembang suatu wilayah
Indikator Kontribusi produksi (daya serap tenaga kerja di sektor industri)	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Prosentase penyerapan jumlah tenaga kerja sektor industri 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Semakin banyak tenaga kerja yang terserap maka perkembangan semakin tinggi
Aksesibilitas	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kerapatan jaringan jalan 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Semakin tinggi kepadatan jalan tingkat perkembangan semakin tinggi

Sumber : Penulis Tahhun, 2008

Analisa data yang digunakan teknik skoring. Sebelum dilakukan skoring langkah yang paling penting yang harus dilakukan adalah memberikan asumsi

terhadap indikator-indikator yang telah dipilih. Bahwa untuk melihat distribusi perkembangan wilayah dengan melihat perbedaan total skor keseluruhan indikator-indikator yang ada. Adapun untuk menentukan prioritas penanganan berdasarkan skor total terendah dan dilihat pada indikator terendahnya apa.

Analisa kuantitatif yang diterapkan adalah melalui klasifikasi dan skoring. Klasifikasi merupakan penyederhanaan pengukuran untuk membuat perbedaan antar wilayah melalui penkelasan setiap variabel terpilih pada setiap satuan analisis ke beberapa klas kategori sesuai kebutuhan sedangkan skoring merupakan pemberian harkat relatif pada klas yang dibuat yang mewakili keadaan berjenjang sehingga memungkinkan pembentukan indeks komposit. Pembuatan klas interval dengan kategorisasi jumlah klas interval yang ditentukan sangat tergantung dari tingkat ketelitian yang diinginkan dan asumsi penelitian yang digunakan, dalam hal ini adalah *chorologi*. Penelitian ini menentukan tiga klas dimana untuk menentukan interval kelas digunakan rumus Sturges sebagaimana berikut.

$$Interval = \frac{Nilai\ Maks - Nilai\ Min}{Kelas}$$

dimana : Maks = Nilai tertinggi

Min = Nilai terendah

Kelas = Jumlah kelas yang diinginkan

1.8.3.1 Teknik Skoring Tingkat Perkembangan Wilayah

- PDRB Perkapita

Tabel 1.11

Klasifikasi PDRB Perkapita Tahun 2002

Tingkat PDRB Perkapita	Besar PDRB Perkapita (Rp)	Skor	Bobot	Nilai (Skor x Bobot)
Rendah	2.039.906.74-----3.707.517.70	1	1	1
Sedang	>3.707.517.70-----5.744.244.40	2	1	2
Tinggi	>574.424.44-----7.042.739.61	3	1	3

Sumber :Analisa Data Pada Halaman Lampiran 4, 2006

Tabel 1.12
Klasifikasi PDRB Perkapita Tahun 2006

Tingkat PDRB perkapita	PDRB Perkapita (Rp)	Skor	Bobot	Nilai (Skor x Bobot)
Rendah	3.615.937,70---6.142.571,6	1	1	1
Sedang	>6.142.157,16---8.668.376,61	2	1	2
Tinggi	>8.668.376,61---11.194.596,07	3	1	3

Sumber :Analisa Data Pada Halaman Lampiran 5, 2006

-Ketersediaan Fasilitas Fisik

Tabel 1.13
Klasifikasi Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perdagangan Tahun 2002

Tingkat Klasifikasi Toko	% Ketersediaan	Skor	Bobot	Nilai (Skor x Bobot)
Rendah	8-----24	1	1	1
Sedang	>24-----40	2	1	2
Tinggi	>40-----56	3	1	3
Tingkat Klasifikasi Pasar	% Ketersediaan			
Rendah	0-----189	1	2	2
Sedang	>189-----378	2	2	4
Tinggi	>378-----567	3	2	6

Sumber :Analisa Data Pada Halaman Lampiran 7, 2006

Tabel 1.14
Klasifikasi Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perdagangan Tahun 2006

Tingkat Klasifikasi Toko	% Ketersediaan	Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)
Rendah	8-----23,66	1	1	1
Sedang	>23,66-----39,33	2	1	2
Tinggi	>39,3-----55	3	1	3
Tingkat Klasifikasi Pasar	% Ketersediaan			
Rendah	0-----166,67	1	2	2
Sedang	>166.67-----333,33	2	2	4
Tinggi	> 333,33-----500	3	2	6

Tabel 1.15
Klasifikasi Tingkat Ketersediaan Fasilitas Pendidikan Tahun 2002

Tingkat Klasifikasi TK	% Ketersediaan	Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)
Rendah	13-----35,66	1	1	1
Sedang	>35,66-----58,33	2	1	2
Tinggi	>58,33-----81	3	1	3
Tingkat Klasifikasi SD				
	% Ketersediaan			
Rendah	121-----152	1	2	2
Sedang	>152-----182	2	2	4
Tinggi	>182-----213	3	2	6
Tingkat Klasifikasi SLTP				
	% Ketersediaan			
Rendah	32-----55	1	3	3
Sedang	>55-----78	2	3	6
Tinggi	>78-----101	3	3	9
Tingkat Klasifikasi SLTA				
	% Ketersediaan			
Rendah	0-----30,66	1	4	4
Sedang	>30,66-----61,32	2	4	8
Tinggi	>61,32-----92	3	4	12

Sumber :Analisa Data Pada Halaman Lampiran 9, 2006

Tabel 1.16
Klasifikasi Tingkat Ketersediaan Fasilitas Pendidikan Tahun 2006

Tingkat Klasifikasi TK	% Ketersediaan	Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)
Rendah	55-----79	1	1	1
Sedang	>79-----103	2	1	2
Tinggi	>103-----127	3	1	3
Tingkat Klasifikasi SD				
	% Ketersediaan			
Rendah	117-----154,7	1	2	2
Sedang	>154,7-----192,4	2	2	4
Tinggi	>192,4-----230	3	2	6
Tingkat Klasifikasi SLTP				
	% Ketersediaan			
Rendah	31-----45,33	1	3	3
Sedang	>45,33-----59,66	2	3	6
Tinggi	>59,66-----74	3	3	9
Tingkat Klasifikasi SLTA				
	% Ketersediaan			
Rendah	8-----38	1	4	4
Sedang	>38-----68	2	4	8
Tinggi	>68-----98	3	4	12

Sumber :Analisa Data Pada Halaman Lampiran 15, 2006

Tabel 1.17
Klasifikasi Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Tahun 2002

Tingkat Ketersediaan Puskesmas	% Ket. Puskesmas	Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)
Rendah	50-----133,33	1	3	3
Sedang	>133,33-----213,66	2	3	6
Tinggi	>213,66-----300	3	3	9
Tingkat Ketersediaan Pusk pembantu				
Rendah	40-----82,33	1	2	2
Sedang	>82,33-----124,66	2	2	4
Tinggi	>124,66-----167	3	2	6
Tingkat Ketersediaan tempat Praktek dokter				
Rendah	0-----26,33	1	1	1
Sedang	>26,33-----52,66	2	1	2
Tinggi	>52,66-----79	3	1	3

Sumber :Analisa Data Pada Halaman Lampiran 11, 2006

Tabel 1.18
Klasifikasi Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Tahun 2006

Klasifikasi Ketersediaan Puskesmas	% Ket. Puskesmas	Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)
Rendah	50-133,33	1	3	3
Sedang	>133,33-213,66	2	3	6
Tinggi	>213,66-300	3	3	9
Klasifikasi Ketersediaan Puskesmas Pembantu				
Rendah	40----76,67	1	2	2
Sedang	> 76,67----113,34	2	2	4
Tinggi	> 113,4----150	3	2	6
Klasifikasi Ketersediaan tempat Praktek dokter				
Rendah	0-91,67	1	1	1
Sedang	>91,67---183,34	2	1	2
Tinggi	>183,34----275	3	1	3

Sumber :Analisa Data Pada Halaman Lampiran 17, 2006

- **Kepadatan Penduduk**

Tabel 1.19
Klasifikasi Kepadatan Penduduk Tahun 2002

Klasifikasi Kepadatan Penduduk	Jumlah Penduduk	Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)
Rendah	456-----1045	3	1	3
Sedang	>1045-----1634	2	1	2
Tinggi	>1631-----2166	1	1	1

Sumber :Analisa Data Pada Halaman Lampiran 2, 2006

Tabel 1.20
Klasifikasi Kepadatan Penduduk Tahun 2006

Klasifikasi Kepadatan Penduduk	Jumlah Penduduk/km ²	Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)
Rendah	435-----1033	3	1	3
Sedang	1033-----1631	2	1	2
Tinggi	1631-----2228	1	1	1

Sumber :Analisa Data Pada Halaman Lampiran 3, 2006

- Pertumbuhan Penduduk

Tabel 1.21
Klasifikasi Pertumbuhan Penduduk Tahun 2002

Klasifikasi Pertumbuhan Penduduk	Pertumbuhan penduduk (%)	Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)
Rendah	(-0,08)-----(-0,30)	3	1	3
Sedang	(>-30)-----(-0,68)	2	1	2
Tinggi	(>0,68) -- -----(-1,05)	1	1	1

Sumber :Analisa Data Pada Halaman Lampiran 2, 2006

Tabel 1.22
Klasifikasi Pertumbuhan Penduduk Tahun 2006

Klasifikasi Pertumbuhan Penduduk	Pertumbuhan penduduk (%)	Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)
Rendah	(-0,36)-----(-0,31)	3	1	3
Sedang	(>-31)-----(-0,98)	2	1	2
Tinggi	(>0,98) -- -----(-1,65)	1	1	1

Sumber :Analisa Data Pada Halaman Lampiran 3, 2006

Indikator Produksi

Tabel 1.23
Klasifikasi Tenaga Kerja yang Terserap Sektor Industri 2002

Klasifikasi Daya Serap Tenaga Kerja Sektor Industri	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri	Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)
Rendah	0-----2266	1	1	1
Sedang	(>2266)---- 4533	2	1	2
Tinggi	(>4533) ---6799	3	1	3

Sumber :Analisa Data Pada Halaman Lampiran 19, 2006

Tabel 24
Klasifikasi Tenaga Kerja yang Terserap Sektor Industri 2006

Klasifikasi Daya Serap Tenaga Kerja Sektor Industri	Tenaga Kerja Sektor Industri	Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)
Rendah	0-----2589	1	1	1
Sedang	(>2589)---- 5178	2	1	2
Tinggi	(>5178) ---7767	3	1	3

Sumber :Analisa Data Pada Halaman Lampiran 20, 2006

Indikator Aksesibilitas

Tabel 1.25
Klasifikasi Indikator Aksesibilitas Tahun 2002

Klasifikasi Kerapatan Jaringan Jalan	Kerapatan Jaringan Jalan (m/km ²)	Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)
Rendah	3.479.7135-----57.656.117	1	1	1
Sedang	(>5.765.6117)----8.051.5098	2	1	2
Tinggi	(>8.051.5098) ---10.337.4080	3	1	3

Sumber :Analisa Data Pada Halaman Lampiran 21, 2006

Tabel 1.26
Klasifikasi Indikator Aksesibilitas Tahun 2006

Klasifikasi Kerapatan Jaringan Jalan	Kerapatan Jaringan Jalan (m/km ²)	Skor	Nilai	Nilai (Skor X Bobot)
Kepadatan Rendah	3.479.7135-----57.656.117	1	1	1
Kepadatan Sedang	(>5.765.6117)----8.051.5098	2	1	2
Tinggi	(>8.051.5098) ---10.337.4080	3	1	3

Sumber :Analisa Data Pada Halaman Lampiran 22, 2006

Setelah di analisa dengan teknik skoring maka dapat ditentukan tingkat potensi sosio demografi, kontribusi tenaga kerja yang terserap pada sektor industri dan aksesibilitas wilayah Tahun 2002 dan 2006. Penentuan skor setiap indikator yaitu tinggi, sedang dan rendah. Klasifikasi ini kemudian diskoring. Meskipun dengan tingkat klasifikasi sama masing-masing indikator (tinggi, sedang dan rendah), tetapi belum tentu memiliki skor yang sama hal ini tergantung pengaruh indikator terhadap perkembangan wilayah. Setelah masing-masing indikator di skoring kemudian dicari nilai kumulatifnya dengan menggabungkan nilai per

indikator tiap kecamatan dalam hal ini yaitu indikator sosio ekonomi demografi, kontribusi tenaga kerja sektor industri dan aksesibilitas wilayah. Dengan memaparkan nilai kumulatif masing-masing kecamatan, maka selanjutnya diklasifikasikan dengan rumus Sturges yaitu dengan mengurangi nilai maksimal (tertinggi) dengan nilai minimal (skor terendah) dibagi menjadi klasifikasi yang diinginkan dalam hal ini dibagi menjadi 3 klasifikasi yaitu klasifikasi tingkat perkembangan tinggi, sedang, dan rendah yang kemudian disajikan kedalam peta potensi wilayah sosio ekonomi demografi, kontribusi tenaga kerja sektor industri dan aksesibilitas wilayah Tahun 2002 dan 2006.

Sedangkan Tingkat perkembangan wilayah ditentukan dengan mengkomparasikan nilai potensi wilayah sosio ekonomi demografi, kontribusi tenaga kerja sektor industri dan aksesibilitas wilayah Tahun 2002 dan 2006. Komparasi nilai potensi wilayah sosio ekonomi demografi, kontribusi tenaga kerja sektor industri dan aksesibilitas wilayah Tahun 2002 dan 2006 akan menghasilkan nilai perkembangan wilayah Tahun 2006, yang secara teknis dihasilkan dengan mengurangi nilai potensi wilayah sosio ekonomi demografi, kontribusi tenaga kerja sektor industri dan aksesibilitas wilayah Tahun 2002 dan 2006.

Selanjutnya untuk mengetahui dan melihat pola persebaran tingkat potensi wilayah sosio ekonomi demografi, kontribusi tenaga kerja sektor industri dan aksesibilitas wilayah Tahun 2002 dan 2006 serta perkembangan wilayah Tahun 2006 digunakan analisa tetangga terdekat (*Nearest neighborhood analysis*). Sedangkan untuk penentuan prioritas pengembangan wilayah yaitu dengan analisa komparatif dengan membandingkan potensi wilayah sosio ekonomi demografi, kontribusi tenaga kerja sektor industri dan aksesibilitas wilayah Tahun 2002 dan 2006. Dengan melihat perubahan skoring pada Tahun 2002 sampai 2006 masing-masing kecamatan kemudian diklasifikasikan dengan rumus Sturges sehingga didapatkan 3 prioritas, yaitu prioritas I (jangka pendek), prioritas II (jangka menengah), dan prioritas III (jangka panjang) yang disajikan kedalam peta prioritas pengembangan wilayah Kabupaten Boyolali. Dengan melihat peta prioritas pengembangan wilayah Kabupaten Boyolali maka dapat diketahui wilayah-wilayah manakah yang harus diprioritaskan untuk dikembangkan.

Wilayah yang mengalami penurunan skoring kumulatif paling besar dari Tahun 2002 ke Tahun 2006 menjadi prioritas I yang harus didahulukan, sedangkan yang dikembangkan tentunya dengan melihat dan mengacu indikator-indikator yang dipakai dalam penelitian ini.

Prioritas pengembangan selain dengan analisa skoring potensi wilayah sosio ekonomi demografi, kontribusi tenaga kerja sektor industri dan aksesibilitas wilayah Tahun 2002 dan 2006 maka dilakukan dengan analisa komparatif maka juga dilakukan dengan analisa Uji Tanda yaitu salah satu uji statistik yang tertua dari semua uji statistik non-parametrik. uji statistik ini disebut uji tanda karena seperti yang akan dianalisis, data untuk dianalisis menjadi serangkaian tanda "+" dan minus "-" dengan demikian, statistik uji yang digunakan dalam uji tanda adalah jumlah tanda plus dan minus terhadap ketersediaan fasilitas yaitu perdagangan, pendidikan dan kesehatan yang mengalami kekurangan ketersediaan sesuai standar untuk mengetahui wilayah mana saja yang harus diprioritaskan untuk dikembangkan untuk menopang perkembangan wilayah.

1.9 Batasan Operasional

1. Wilayah adalah kawasan-kawasan geografi yang kenal secara luas sebagai satuan-satuan politis dalam administratif yang dibentuk dari kebijaksanaan umum (Hadi Sabari Yunus, 1991).
2. Pewilayahan adalah suatu usaha membagi-bagi permukaan bumi untuk tujuan tertentu. Pembagian ini dapat didasarkan pada karakteristik tertentu (Hadi Sabari Yunus, 1991).
3. Perencanaan adalah suatu proses berkesinambungan atau berkelanjutan sejak tahap survey sampai tahap pengamatan (Suwardjoko Warpani, 1984)
4. Tingkat perkembangan wilayah adalah ukuran rangking secara relative yang menyatakan kemajuan yang dicapai oleh suatu wilayah sebagai hasil aktivitas pembangunan dibandingkan dengan wilayah lainnya (Hadi Sabari Yunus, 1991).
5. Wilayah prioritas pembangunan adalah wilayah yang tingkat perkembangan, potensi dan permasalahannya harus diprioritaskan untuk dikembangkan untuk

mengurangi kesenjangan antar wilayah (Hadi Sabari Yunus, 1991). Prioritas ditentukan dengan cara melihat hasil komparasi tingkat perkembangan Tahun 2002 dan 2006. Kecamatan yang mengalami penurunan skor terbesar akan menjadi prioritas pertama untuk dikembangkan. Sedangkan dengan analisa uji tanda prioritas ditentukan dengan melihat banyaknya tanda min atau kecamatan yang kekurangan ketersediaan fasilitas, semakin banyak tanda min maka wilayah tersebut akan menjadi prioritas pertama yang harus ditangani.

6. Pengembangan adalah memajukan atau memperbaiki atau meningkatkan sesuatu yang ada (Yohara T. Jayadinata, 1999)
7. Fasilitas sosial adalah segala fasilitas pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun non pemerintah yang mempengaruhi pengaruh langsung ataupun pengaruh nyata menurut fungsi sosial dari pelayanan tersebut kepada penggunanya.
8. Tingkat kesenjangan perkembangan wilayah adalah terjadinya perbedaan yang ekstrim atau selisih yang besar antar wilayah dengan melihat variabel perkembangan wilayah yang dipilih, misalkan wilayah yang mempunyai ketersediaan fasilitas puskesmas 100% atau lebih dengan wilayah yang hanya memiliki ketersediaan kurang dari 50% dan seterusnya.
9. Analisa uji tanda yaitu salah satu uji statistik yang tertua dari semua uji statistik non-parametrik dimana data untuk dianalisis menjadi serangkaian tanda 33 dan minus "-". (*Innedeny, 20004*).
10. Analisa Komparatif adalah dilakukan dengan cara menggabungkan/menyatukan data suatu indikator atau parameter yang dipakai dalam suatu penelitian dengan dua periode waktu tertentu atau lebih (*Innedeny, 2004*).
11. Strategi adalah rencana jangka panjang dengan diikuti tindakan-tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu, yang umumnya adalah "kemenangan"/keberhasilan.